

TAHANAN POLITIK 1974

Oleh Nurcholish Madjid

Akhirnya keluar sebuah keterangan dari pemerintah bahwa saat ini terdapat sebanyak 45 orang yang ditahan karena alasan-alasan politis. Jadi kalau dibenarkan menaruhnya dalam suatu ungkapan yang sudah umum dan sedikit tajam, maka kini terdapat “tahanan politik” atau “tapol” baru — katakanlah “tahanan politik 1974” — mengingat mereka dikenakan penahanan itu pada awal tahun 1974. Dan ungkapan itu harus diletakkan dalam tanda kutip, sebab kita tidak menghendaki adanya asosiasi yang menjurus ke penyamaan dengan tapol-tapol PKI. Juga kita tidak menghendaki adanya konotasi-konotasi tertentu yang amat lekat pada ungkapan itu di kalangan masyarakat luas.

Rasanya memang dapat dimengerti, atau bahkan dibenarkan, adanya pembagian oleh pihak yang berwajib terhadap mereka yang terlibat peristiwa pertengahan Januari itu ke dalam dua kategori: politik dan kriminal. Sebab meskipun yang amat menonjol secara lahir dalam peristiwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan kriminal, tetapi tidaklah berarti orang-orang yang terlibat di dalamnya, lebih dalam keseluruhan prosesnya, adalah kriminal-kriminal saja. Banyak dari mereka yang hanya bermotifkan politik semata-mata, dan sering mereka ini secara sungguh-sungguh tidak menyetujui tindakan-tindakan yang eksekutif tersebut. Meski dalam analisis terakhir, dan dari sudut pandangan yang berwajib, mereka tidak dapat dengan begitu saja melepaskan seluruh tanggung jawab. Mereka pun kiranya akan secara sportif menerima keharusan itu.

Tetapi setiap kegiatan politik, termasuk yang dilakukan oleh para “tahanan politik” tersebut adalah didorong oleh adanya suatu cita, tanpa terlebih dahulu menilai apakah cita-cita politik itu benar atau salah, tinggi atau rendah. Yang kita maksudkan dengan benar atau salah ialah jika diukur dari norma nasional yang melandasi kenegaraan kita, yaitu Pancasila dan UUD 45. Sedangkan dengan tinggi atau rendah kita maksudkan nilai cita-cita ini dilihat dari segi motivasi individual yang bersangkutan: apakah cita-cita politik itu untuk mewujudkan suatu ide yang mempunyai *scope* luas meliputi seluruh rakyat, ataukah hanya meliputi golongan sendiri secara sempit bahkan hanya merupakan ambisi pribadi saja.

Namun, setiap kita tentu menyadari betapa sulitnya menetapkan penilaian serupa itu. Hal ini disebabkan relatifnya ukuran-ukuran sekunder berupa nilai-nilai bagaimana kita memahami dan menafsirkan prinsip-prinsip dalam Pancasila tersebut. Contoh yang paling dalam hal ini adalah yang menyangkut pribadi almarhum Bung Karno. Meskipun dengan berbagai cara kita memang dapat menopang teori bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu terdapat dalam hati sanubari bangsa kita semenjak entah berapa zaman yang silam, namun suatu fakta sejarah yang tak mungkin dipungkiri menunjukkan bahwa Bung Karno-lah yang “menggali-nya” atau sekurang-kurangnya merumuskan, bahkan mungkin sekadar mengemukakannya dalam forum suatu badan yang mempersiapkan kemerdekaan bangsa kita pada tahun 1945. Dan suatu fakta sejarah juga menunjukkan bahwa justru karena Bung Karno yang mengemukakan maka Majelis menyetujuinya dan menetapkannya sebagai dasar negara. Sebab pada waktu itu kekuatan Bung Karno selaku *solidarity makers* adalah mutlak efektif. Dan dalam masa-masa selanjutnya dalam karier Bung Karno sebagai politikus, ia senantiasa dengan tepat menggunakan palu godam “membahayakan Pancasila” untuk untuk memukul hancur lawan-lawannya. Tetapi ... Bung Karno pulalah orang yang dalam fase-fase terakhir proses pemantapan Orde Baru harus “diamankan”, juga dengan penilaian umum bahwa dia telah membahayakan, sekurang-kurangnya

menyeleweng dari rel Pancasila. Yaitu dengan bukti diberikannya keleluasaan dan perlindungan yang melewati proporsinya kepada PKI dan kegiatan-kegiatan politiknya. Hampir semua orang, kecuali sedikit saja, menganut penilaian itu dan menganggap penyingkiran Bung Kamo sebagai sesuatu yang sudah semestinya.

Hal itu kita kemukakan, sekadar untuk menunjukkan betapa relatifnya suatu penilaian terhadap suatu jenis kegiatan politik. Oleh karena itulah kita harus memegang teguh norma-norma hukum dalam menetapkan salah-tidaknya seseorang dalam hal tersebut, dan dengan rajin “berkonsultasi” kepada hati nurani kita untuk memperoleh kearifan atau *wisdom* yang sedalam-dalamnya dalam pemberian penilaian itu. Sebab sering terjadi bahwa orang-orang yang dianggap salah pada saat ini dapat menjelma menjadi pahlawan pada masa-masa yang akan datang, jauh ataupun dekat. Begitu juga orang-orang yang pada saat tertentu dianggap sebagai amat berjasa ternyata di kelak kemudian harus dikutuk. Mencari makna yang hakiki ini merupakan bagian dari rasa keagamaan. Maka dari itu agama senantiasa menganjurkan agar kita berdoa memohon petunjuk Tuhan, sebab pada dasarnya kita tidak mengetahui secara hakiki apa kebenaran itu. Hanya saja agama mengajarkan bahwa hendaknya kita memohon “pungkasan yang baik” (*ḥusn al-khâtimah*) dalam hidup ini. [❖]